

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Adam Chazawi. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1: Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan, Dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*. Cet. 7. PT Raja Grafindo Persada, Jakarta. 2012.
- Andi Muhammad Sofyan Dan Abdul Asis. *Hukum Acara Pidana: Suatu Pengantar*. Pt Balebat Dedikasi Prima, Jakarta. 2017.
- Bakhri. *Perkembangan Stelsel Pidana Indonesia*. Total Media, Yogyakarta. 2009.
- Bambang Waluyo. *Pidana dan Pemidanaan*. Cet. 4. Sinar Grafika, Jakarta. 2014.
- Burhan Ashshofa. *Metode Penelitian Hukum*. Cet. 6. Rineka Cipta, Jakarta. 2010.
- Erdianto Effendi. *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*. Refika Aditama, Bandung. 2011.
- Indonesian Center For Environmental Law. *Arah Baru Kebijakan Penegakan Hukum Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya*, ICEL, Jakarta. 2019.
- KoesnandiHardjasoemantri. *Hukum Perlindungan Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya*. Cet 1. Gajah Mada University Press, Yogyakarta. 2009.
- Marlina. *Hukum Penitensier*. Cet. 1. PT Refika Aditama, Bandung. 2011.
- P.A.F. Lamintang danTheo Lamintang. *Hukum Penitensier Indonesia*. Cet. 1. Sinar Grafika, Jakarta. 2010.
- Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum Edisi Revisi*. Kencana Prenada Media Group, Jakarta. 2013.
- Rasyid Ariman Dan Fahmi Raghieb. *Hukum Pidana*. Setara Pers, Malang. 2016.
- S.R Sianturi. *Asas-Asas Hukum Pidana dan Penerapannya di Indonesia*. Cet. 2. Alumni AHAEM PTHAEM, Jakarta. 1998.
- Teguh Prasetyo. *Hukum Pidana (Edisi Revisi)*. Cet. 6. Rajawali Pers, Jakarta. 2015.
- Usman Dan Nurdin. *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*. PT Raja Grafindo Persada, Jakarta. 2002.

Wahyu Sasongko. *Ketentuan-ketentuan Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*. Universitas Lampung, Bandar Lampung. 2007.

Wirjono Prodjowikoro. *Asas-Asas Hukum di Indonesia*. Refika Aditama, Bandung. 2009.

Zaeni Asyhadie Dan Arief Rahman. *Pengantar Ilmu Hukum*. Cet. 1. PT Raja Grafindo Persada, Jakarta. 2013.

Zuleha. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Deepublish. Yogyakarta. 2017.

B. Jurnal

Dheny Wahyudhi. “Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan Cyber Crime Di Indonesia”. *Jurnal Ilmu Hukum*. 2013.

Hafrida et.al. “Penyuluhan Hukum Resolusi Konflik Sumber Daya Alam Di Kabupaten Batanghari”. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Volume 29 Nomor 4*. 2014.

Indung Wijayanto, “Kebijakan Pidana Denda di KUHP dalam Sistem Pemidanaan Indonesia”, *Pandecta Volume 10 Nomor 2*. 2015.

M.Yasin Al Arif. “Penegakan Hukum dalam Perspektif Hukum Progresif”. *Undang:JurnalHukum Volume 2 Nomor 1*. 2019.

Meli Indah Sari dan Hafrida. “Penerapan Pidana Penjara Sebagai Pengganti Pidana Denda Dalam Putusan Perkara Tindak Pidana Narkotika”. *PAMPAS: Journal Of Criminal Law Volume 1 Nomor 1*. 2020.

Nyimas Arfa, Syofyan Nur Dan Yulia Monita, “Pola Pembinaan Terhadap Narapidana Seumur Hidup Dalam Kebijakan Implementasinya”. *Jurnal Sains Sosio-Humaniora Volume 3 Nomor 2*. 2019.

Sri Dewi Rahayu Dan Yulia Monita, “Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Perkara Tindak Pidana Narkotika”, *PAMPAS: Journal Of Criminal Law Volume 1 Nomor 1*. 2020

Sri Rahayu Dan Dheny Wahyudhi, “Penegakan Hukum Ketentuan Pidana Pasal 158 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Terhadap Kegiatan Pertambangan Tanpa Izin di Kabupaten Muaro Jambi”, *Jurnal Ilmu Hukum. Volume 6 Nomor 2*. 2013.

Sulistiani, Hafrida dan Yulia Monita, “Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Memberikan Putusan Lepas (Onslag) Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi”, *PAMPAS: Journal of Criminal Law Volume 4 Nomor 1*. 2023.

Tubagus Sukmana dan Tami Rusli. "Pertimbangan Hakim Terhadap Putusan Tindak Pidana Pemerasan", *PAMPAS: Journal Of Criminal Volume 3 Nomor 1*. 2022.

C. PeraturanPerundang-Undangan

Republik Indonesia. *Undang-Undang Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981.

_____. *Undang-Undang Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya*. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3419.

_____. *Undang-Undang Tentang Kekuasaan Kehakiman*. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004.

D. Internet

<https://Kbbi.Web.Id/Terap-2>. Di Akses Pada Tanggal 27 Februari 2020. Pukul 23.49 WIB.

<http://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/penyelundupan>. Diakses Pada Tanggal 01 Maret 2020, Pukul 01.38 WIB.

<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/satwa>. Diakses Pada Tanggal 01 Maret 2020. Pukul 01.55 WIB.

<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/dilindungi>. Diakses Pada Tanggal 01 Maret 2020. Pukul 02.01 WIB.

https://www.balitbangham.go.id/po-upload/humanis_volume_1_tahun_2015/
Diakses pada tanggal 11 Januari 2023, Pukul 22:14 WIB